

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yang secara relatif sesuai dengan persepsi diri seseorang, bukan hanya dari ketidakmampuan ekonomis tetapi juga dalam aspek sosial, politik, maupun spritual (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2012). Kelompok masyarakat miskin disesuaikan dengan karakteristiknya yaitu memiliki kemampuan yang lemah dalam berusaha, terbatasnya akses kegiatan ekonomi, sehingga hal tersebut mengakibatkan masyarakat tersebut semakin tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1993). *Poverty Profile* yang dikemukakan oleh Moeljarto (1995), yaitu kemiskinan tidak hanya masalah kesejahteraan akan tetapi kemiskinan mempunyai enam alasan sebagai berikut:

1. Masalah Kemiskinan termasuk dalam masalah kerentanan.
2. Kemiskinan berarti tutupnya akses terhadap peluang kerja, hal tersebut dikarenakan hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi pada proses produksi.
3. Masalah kemiskinan berarti masalah kepercayaan, emosional dan sosial. Penentuan keputusan yang dilakukan oleh para birokrat tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri.

4. Kemiskinan berarti penghasilan yang dihabiskan untuk konsumsi pangan dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas.
5. Rasio ketergantungan yang tinggi dikarenakan faktor dari jumlah keluarga.
6. Kemiskinan yang diwariskan terus menerus.

Sharp *et al.* (1996) dalam Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi. Pertama yaitu secara mikro, munculnya kemiskinan dikarenakan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Artinya, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dengan kualitas rendah. Kedua, munculnya kemiskinan dikarenakan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah artinya produktivitas juga rendah yang berarti mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Ketiga, munculnya kemiskinan dikarenakan adanya perbedaan akses dalam modal. Menurut Chambers dalam Nasikun (2001) kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bentuk, di antaranya:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu kemiskinan yang timbul karena pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu suatu kondisi miskin dikarenakan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang timbul disebabkan oleh faktor budaya dalam masyarakat, tidak adanya keinginan dan usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif.
4. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang timbul dikarenakan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

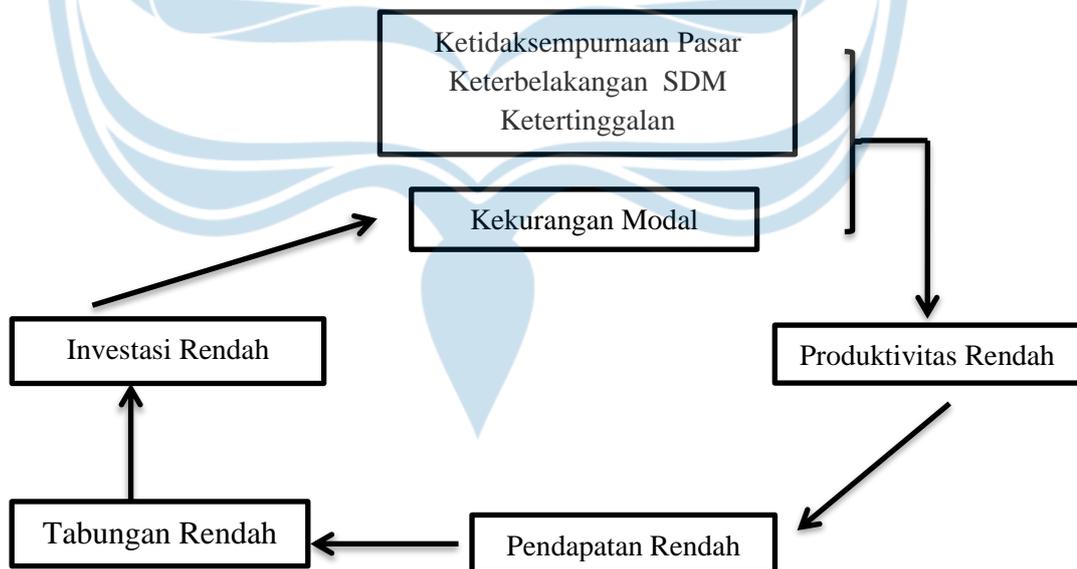
2.1.1.1 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Chamsyah (2008) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit menganut sistem modern dalam cara produksinya. Teori yang lazim untuk menjelaskan akar kemiskinan dikemukakan oleh Usman (1993), teori tersebut disebut teori marginalisasi, yang merupakan kemiskinan dianggap sebagai akibat dari adanya tabiat apatis, fatalisme, bergantung pada bantuan, rendah diri, sifat pemboros, konsumtif serta kurangnya jiwa untuk berwiraswasta. Beberapa pandangan juga dikemukakan oleh Munker dan Walter (2001) mengenai penyebab kemiskinan di antaranya:

1. Rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan merupakan penyebab utama kemiskinan maka diperlukan peningkatan produktivitas, kebebasan dalam akses ke pasar, serta memberlakukan harga yang wajar untuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang miskin.

2. Buruknya kondisi lingkungan di alam yang menjadi penyebab krusial meluasnya kemiskinan.
3. Rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap informasi mengenai pendidikan, pelatihan dan bimbingan maka harus dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997) kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Ketidaktepatan pasar, keterbelakangan SDM, serta kurangnya modal menyebabkan produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, karena pendapatan rendah menyebabkan investasi dan tabungan menjadi menurun. Lingkaran setan kemiskinan tersebut dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2. 1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

2.1.1.2 Indikator Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2018) yaitu dengan menggunakan pendekatan kemampuan kebutuhan (*basic needs approach*) yang mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality*. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran. Dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita dalam per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2003) indikator utama kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Pembangunan yang bias kota.
- 4) Perbedaan kesempatan antara masyarakat.
- 5) Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi.
- 6) Produktivitas yang rendah.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan di negara berkembang dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat efektif yaitu melalui transfer langsung dan subsidi dengan beberapa prasyarat, yaitu:

1. Transfer dan bantuan subsidi kepada masyarakat harus dipastikan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dikarenakan sumber daya yang terbatas.
2. Penerima tidak bergantung pada bantuan, tetapi dapat termotivasi untuk membangun aset seperti pendidikan anak yang berguna untuk mencegah anak tetap dalam kondisi miskin.

Nafziger (2005) dalam bukunya berjudul *Economic Development* mengemukakan beberapa strategi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan reformasi pertanahan dan redistribusi lahan. Kepemilikan lahan pertanian terkonsentrasi pada kelompok masyarakat kecil petani sedangkan ketersediaan lahan pertanian sudah semakin berkurang. Adanya reformasi agraria atau pertanahan dan redistribusi lahan merupakan strategi yang diperlukan dalam upaya mengurangi kemiskinan.
2. Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan. Investasi modal manusia penting untuk menghasilkan pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar dan gratis merupakan salah satu cara untuk mendistribusi modal manusia kepada masyarakat miskin. Kualitas pendidikan juga harus diseimbangkan dengan peningkatan derajat kesehatan dan nutrisi penduduk khususnya pada anak-anak.
3. Permodalan dan perkreditan. Salah satu masalah yang dirasakan oleh penduduk miskin adalah kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan. Strategi yang diperlukan adalah program perkreditan dan permodalan khusus

bagi penduduk miskin dengan beberapa prosedur persyaratan yang tentunya lebih mudah.

2.1.2 Dana Desa

Dana desa merupakan dana APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang kemudian diprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan (Kementerian Keuangan, 2017). UU no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (2) tentang desa dimana besaran alokasi anggaran desa yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) yang dilakukan secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa kemudian dialokasikan sesuai dengan jumlah penduduk di setiap desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022) menjelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan dengan dua kategori, yaitu reguler dan mandiri yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan di setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.07/2021 yaitu:

1. Penyaluran Dana Desa Reguler, penyaluran tersebut dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap I sebesar 40 persen di bulan januari , tahap II sebesar 40 persen di bulan maret dan tahap III sebesar 20 persen di bulan juni.

2. Penyaluran Dana Desa Mandiri, penyaluran tersebut dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 60 persen pada bulan januari dan tahap II sebesar 40 persen pada bulan maret.

2.1.2.1 Tujuan Dana Desa

Menurut Kementerian keuangan (2017) penyaluran dana desa mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Mampu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.2.2 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Kementerian Keuangan (2017) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip penggunaan dana desa sebagai penetapan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan, merupakan prinsip yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa adanya perbedaan.
2. Kebutuhan prioritas, merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesa dan dibutuhkan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di desa.
3. Partisipatif, merupakan prinsip yang mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
4. Kewenangan desa, merupakan prinsip yang mengutamakan kewenangan mengenai hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, merupakan prinsip yang melakukan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa dengan mengutamakan tenaga, pikiran serta keterampilan masyarakat desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, merupakan prinsip yang mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta melakukan perubahan dalam perkembangan kemajuan desa.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan dalam pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kementerian Keuangan RI, 2018). Jumlah keseluruhan penetapan Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang kemudian ditetapkan dalam APBN. Secara umum, dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk Daerah Provinsi dan dana alokasi umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Penentuan proporsi dana alokasi umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan, tetapi penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi dana alokasi umum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

2.1.3.1 Tahapan Penghitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Kementerian Keuangan (2016) perhitungan Dana Alokasi Umum dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Akademis, tahapan tersebut sebagai konsep awal yang dilakukan oleh Tim Independen yaitu penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU yang bertujuan memperoleh kebijakan perhitungan yang disesuaikan dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah.
2. Tahapan Administratif, tahapan tersebut dilakukan dengan koordinasi oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) dan instansi terkait untuk persiapan data dasar perhitungan DAU dan melakukan konsolidasi serta verifikasi data dengan tujuan mendapatkan validitas data yang akan digunakan.
3. Tahapan Teknis, tahapan tersebut melakukan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan akan dilakukan sesuai dengan formula DAU yaitu dengan menggunakan data yang tersedia dan memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
4. Tahapan Politis, merupakan tahapan akhir yaitu pembahasan penghitungan dan alokasi DAU yang dilakukan antara Pemerintah dan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk melakukan konsultasi dan memperoleh kesepakatan dan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No 33 pasal 1 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang berhubungan dengan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerima DAK di setiap daerah harus memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan pada peraturan perundangan dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis disusun berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik yang apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan benar dapat memperbaiki kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal tersebut tentu berguna dalam penanggulangan kemiskinan serta dapat membangun perekonomian nasional lebih baik. Menurut Kementerian Keuangan (2016) ada beberapa arah kegiatan pada Dana Alokasi Khusus yaitu:

1. DAK Bidang Pendidikan
2. DAK Bidang Kesehatan
3. DAK Bidang Infrastruktur Jalan

4. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
6. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
7. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa
8. DAK Bidang sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
9. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
10. DAK Bidang Pertanian
11. DAK Bidang Keluarga Berencana
12. DAK Bidang Kehutanan
13. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
14. DAK Bidang Sarana Perdagangan
15. DAK Bidang Energi Pedesaan
16. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman
17. DAK Bidang Keselamatan Transportasi

2.1.4.1 Penghitungan Alokasi DAK

Menurut Kementerian Keuangan (2016) Perhitungan alokasi DAK dilakukan dengan 2 tahapan yaitu:

1. Penentuan daerah daerah tertentu yang menerima DAK. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu kriteria umum, khusus dan teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK pada masing-masing daerah. Besarnya alokasi DAK pada masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus dan teknis.

- a) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan (PMK).
- b) Menteri Teknis menyusun Juknis penggunaan DAK berdasarkan PMK.

2.1.5 Pengaruh Antara Variabel

2.1.5.1 Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Penyaluran dana desa tentu mempunyai tujuan, salah satunya yaitu sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka kebijakan penyaluran dana desa menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan perekonomian tingkat desa dan sesuai dengan tujuan dana desa yang berperan penting dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di desa. Implementasi kebijakan penyaluran dana desa dalam tiga tahun pertama (2015-2017) selalu meningkat signifikan setiap tahunnya, hal tersebut bermanfaat secara optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia serta mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian setiap desa (Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, 2018).

Dana desa yang dialokasikan pada pembangunan desa memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di desa, seperti kemudahan dalam mengakses dan memperoleh pelayanan yang bersifat pokok yaitu layanan kesehatan dan pendidikan. Penyaluran dana desa yang dimanfaatkan terhadap pemberdayaan masyarakat memberikan akses dalam mengembangkan potensi desa serta masyarakat dapat menghasilkan suatu produk yang nantinya dapat meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan.

2.1.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan

Sidik dalam Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen dana perimbangan pada APBN yang dialokasikan khusus berdasarkan kesenjangan fiskal atau pengurangan antara *fiskal needs* dengan *fiskal capacity*. Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi dana terbesar dalam Dana Perimbangan sehingga Dana Alokasi Umum mampu membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga memperoleh kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan

Penyaluran Dana Alokasi Khusus mempunyai tujuan, salah satunya adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin untuk dapat mempermudah dalam menikmati hak-hak dasar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program ekonomi penurunan tingkat kemiskinan (Direktorat Jenderal Perimbangan, 2020). Dana Alokasi Khusus Non Fisik di DIY yang disalurkan oleh pemerintah mengalami kenaikan realisasi yaitu pengeluaran untuk Dana Bantuan Operasional (BOS), bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKP) dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD), dan untuk nasional kenaikan berasal dari Dana Bos dan BOKP (Kementerian Keuangan RI, 2017).

DAK penugasan pada tahun 2021 pada Tematik Penanggulangan Kemiskinan dilakukan pada bidang Sanitasi, Air Minum dan Perkim. Martini *et al.*

(2014) menyatakan bahwa DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang akan membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional. Semakin besar bantuan dalam perbaikan sarana dan prasarana, maka semakin mempermudah masyarakat miskin untuk memperoleh berbagai potensi dan dapat mengembangkan sumber daya.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Syah Putra (2019) adalah Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Aceh dengan jumlah 13 kabupaten/kota yang diobservasi selama 3 tahun yaitu 2015 sampai 2017. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear, pengujian pengaruh dana desa dilakukan dengan menguji secara OLS masing-masing variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dana desa sebesar 1% dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 0,316%. Peningkatan 1% dana alokasi khusus dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 0,0403%. Hasil estimasi signifikan pada level 95 persen dan dapat disimpulkan bahwa adanya dana desa menjadi instrumen kebijakan yang tepat dalam pengurangan kemiskinan di Aceh.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Arfiansyah (2020) adalah Dampak Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi

terhadap kemiskinan dengan data penelitian yaitu pagu dana desa, pendapatan domestik bruto dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya jika terjadi peningkatan dana desa akan mengurangi kemiskinan. Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa adalah cara yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan angka kemiskinan. Variabel dana desa dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan 97,9% terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dana *et al.* (2019) adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Pada Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Alat Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif yaitu metode deskriptif korelasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan dan dana alokasi khusus secara parsial juga berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Peningkatan dana alokasi umum dapat menurunkan angka kemiskinan dan kemampuan dana alokasi umum dapat mempengaruhi capaian penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan dalam membiayai belanja modal. Variabel dana alokasi khusus yang dimanfaatkan dalam

meningkatkan pelayanan publik dapat menurunkan angka kemiskinan, tetapi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri dan Anwar (2020) adalah Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Terhadap Kemiskinan di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana gampong terhadap kemiskinan di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kecamatan Makmur, sedangkan alokasi dana gampong tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yanuar *et al.* (2021) adalah Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dana desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sulawesi Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 pada 12 Kabupaten di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pada bidang infrastruktur (sarana dan prasarana) belum mampu berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Sulawesi Tengah, penurunan akan terjadi jika infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak baik terhadap masyarakat. Pada belanja non-infrastruktur (non sarana prasarana) pemanfaatan dana desa belum berpengaruh terhadap kemiskinan. Dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai

2019, peningkatan tersebut disertai dengan penurunan angka kemiskinan, tetapi hasil dari pengujian statistik, secara empiris variabel dana desa pada belanja pendidikan dan belanja modal ternyata tidak signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sulawesi Tengah, sedangkan pemanfaatan dana desa pada variabel belanja kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sampai 2019.

Selanjutnya Wijaya *et al.* (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh dana desa, alokasi dana desa dan dana alokasi umum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan, jadi peningkatan dana desa sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.043. Variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, jadi peningkatan alokasi dana desa sebesar 1 satuan akan mengakibatkan penurunan kemiskinan sebesar 0,040. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.108. Variabel dana desa dan dana alokasi umum menunjukkan arah yang positif, dimana peningkatan

variabel dana desa dan dana alokasi umum akan menambah angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016.

